



Doktrin Poros Maritim Dunia Era Jokowi dan Keamanan di Bidang Maritim Studi Kasus: Perdagangan Narkotika Jalur Laut Tahun 2014-2018

Nur Hakiki

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website:<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Immediately after being elected in 2014, President Joko Widodo put forward the desire to make Indonesia's sea territory the main policy focus. This is implemented by issuing the doctrine of the "Global Maritime Axis". President Jokowi also launched a development agenda focusing on five pillars, one of which concerns maritime security. Narcotics trafficking through the sea is one of the various threats to maritime security in Indonesia. This is also exacerbated by the status of Indonesia which is called a narcotics emergency. This research aims to analyze the impact of the "Global Maritime Axis" doctrine on maritime security, as seen from the development of cases of trafficking in narcotics through the sea that occurred in 2014 to 2018. This research uses the concept of maritime security in understanding the policies of President Jokowi's government in dealing with narcotics trafficking by sea. This research analyzes the impact of the global maritime axis doctrine on government policies, both internal and international cooperation. The results of this research indicate that the policies issued by the government have a positive influence, but are still not optimal in dealing with the problem of trafficking in narcotics through the sea that occurred in the period of 2014 to 2018. This is because there are limitations in terms of facilities and infrastructure, the lack of coordination between the parties involved, and the cooperation that is carried out mostly is still at an early stage and has not shown significant results.

Keyword: *Global Maritime Axis, Maritime Security, Narcotics Trafficking*

PENDAHULUAN

Doktrin “Poros maritim Dunia” muncul karena kesadaran Presiden Jokowi akan potensi kelautan yang dimiliki oleh Indonesia. Doktrin ini ditujukan untuk menjadikan laut sebagai salah satu fokus utama kebijakan. Untuk mencapai doktrin Indonesia sebagai poros maritim dunia tersebut, Presiden mencanangkan agenda pembangunan yang memfokuskan pada lima pilar, yaitu **pertama**, membangun kembali budaya maritim Indonesia. **Kedua**, menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama. **Ketiga**, memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. **Keempat**, menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik. **Kelima**, membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. (kemenlu.go.id, 2014)

Dalam poin ke-5 dibahas mengenai konsep keamanan maritim yang sangat berkaitan dengan doktrin poros maritim dunia. Karena, dengan adanya doktrin ini memperlihatkan

bahwa Indonesia ingin menjadi pusat dalam bidang kemaritiman, baik dengan keterkaitannya dalam hal perdagangan, perekonomian maupun keamanan. Sebagai poros maritim, Indonesia harus mampu menjadikan kawasan lautnya sebagai kawasan yang aman dari berbagai ancaman. Ancaman dalam bidang kemaritiman di Indonesia sangatlah banyak. Salah satunya adalah perdagangan narkoba yang memanfaatkan jalur laut. Hal ini menjadi salah satu ancaman karena laut digunakan sebagai sarana dalam melakukan aksi kejahatan.

Hal ini juga disampaikan secara langsung oleh Presiden Jokowi dalam rapat terbatas mengenai percepatan implementasi poros maritim. Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan, “*ancaman kelautan yang dihadapi Indonesia bukan hanya yang berkaitan dengan pencurian ikan (illegal fishing) saja, tetapi juga pengrusakan lingkungan dan pengrusakan ekosistem laut. Laut juga sering digunakan untuk aksi penyelundupan, peredaran narkoba, perdagangan manusia, lalu lintas imigran gelap dan konflik perebutan sumber daya.*” Presiden menyampaikan perlunya meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia dan diplomasi maritim untuk mengatasi permasalahan tersebut (setkab, 2016).

Munculnya doktrin poros maritim dunia yang memberikan perhatian pada permasalahan keamanan maritim di Indonesia, tentu saja akan memberikan pengaruh bagi perkembangan berbagai kasus yang berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan maritim. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh keberadaan doktrin poros maritim dunia ini terhadap keamanan maritim, mengacu kepada kasus perdagangan narkoba melalui jalur laut tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan konsep keamanan maritim, dimana konsep keamanan maritim ini dapat dipahami sebagai konsep yang mengacu pada keamanan domain maritim atau sebagai seperangkat kebijakan, peraturan, tindakan dan operasi untuk mengamankan domain maritim (Germond, 2015). Jadi, dalam penelitian ini konsep keamanan maritim digunakan untuk melihat berbagai tindakan yang dilakukan pihak-pihak terkait, dalam menangani permasalahan narkoba melalui jalur laut.

PEMBAHASAN

Menurut data RAND Analysis (Morris, 2018), ancaman keamanan maritim di Indonesia biasanya meliputi: (1) *IUU fishing*, termasuk yang berhubungan dengan kejahatan seperti korupsi, penipuan, kejahatan pajak, transaksi bahan bakar illegal dan pencucian uang. (2) Penyelundupan melalui wilayah laut (narkoba, manusia, senjata, produk palsu, barang pertanian dan komoditas) (3) Imigrasi illegal. (4) Perompakan di laut (5) Terorisme. (6) Kejahatan terhadap hak asasi manusia, seperti: tenaga kerja anak, kondisi hidup yang buruk, kondisi kerja yang tidak adil, dll. Diantara berbagai ancaman tersebut, perdagangan narkoba melalui jalur laut merupakan salah satu ancaman yang perlu diperhatikan. Dengan status Indonesia yang disebut darurat narkoba dan data dari BNN yang menyebutkan 90 % peredaran narkoba di Indonesia dilakukan melalui jalur laut, menjadikan masalah peredaran narkoba jalur laut sebagai salah satu ancaman yang cukup besar bagi keamanan maritim Indonesia.

Luasnya wilayah laut yang dimiliki Indonesia, menimbulkan peluang munculnya ancaman juga semakin besar. Selain itu, Indonesia juga berbatasan laut dengan 10 negara tetangga, sehingga keamanan wilayah laut dari peredaran keluar masuknya narkoba juga semakin besar. Narkoba jalur laut ini bisa masuk melalui jalur resmi (jalur resmi untuk kapal ekspor dan impor) atau melalui jalur yang tidak resmi seperti pelabuhan dan pulau-pulau terpencil yang minim pengawasan. Untuk rute yang dilalui, biasanya narkoba yang berasal dari wilayah Asia masuk melalui perairan di timur Sumatera yang berbatasan dengan Malaysia dan melalui Kalimantan. Tiga jalur utama menurut BNN adalah Aceh, Dumai dan Tarakan. Karena rentannya kejahatan ini terjadi, maka kemampuan penanganan di lingkup domestik dan kerjasama dengan negara tetangga sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan ini.

Upaya Domestik dalam Pemberantasan Perdagangan Narkotika Jalur Laut

Dalam lingkup domestik, pihak yang terlibat secara umum dapat dibagi menjadi tiga golongan. **Pertama** adalah pihak yang berkaitan langsung menangani narkotika yaitu BNN. BNN merupakan *focal point* dalam hal penanganan permasalahan narkotika di Indonesia. Tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan narkotika. Terkait dengan anggaran yang dimiliki oleh BNN, sampai saat ini terbilang masih terbatas. Meskipun dengan status Indonesia yang dinyatakan sudah darurat narkotika, namun hal ini belum didukung dengan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk BNN sendiri. Pernyataan mengenai kurangnya anggaran yang dimiliki ini seringkali disampaikan oleh pihak BNN. Anggaran satu tahun untuk seluruh BNN baik pusat, provinsi, kota atau kabupaten pada tahun 2017 adalah Rp 1,3 Triliun. Sekitar 70 persen dari anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji pegawai. Sisanya 30 persen untuk pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan pemberantasan narkotika (Belarminus, 2017).

Terkait dengan permasalahan peredaran narkotika melalui jalur laut, BNN memiliki keterbatasan dalam hal melakukan penanganan. Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari menyampaikan bahwa BNN tidak memiliki kapal atau pesawat untuk melakukan patroli. Dibandingkan dengan satuan anti-narkotika milik Kolombia, satuan anti-narkotika Kolombia punya 154 pesawat dan alat canggih lainnya untuk melakukan pengawasan dan pemberantasan peredaran narkotika disana (Pitoko, 2018). Mengenai jumlah personil, total seluruh personil yang dimiliki BNN dalam laporan tahun 2017 baik di tingkat pusat, provinsi, kota atau kabupaten yakni 4.700 orang. Padahal, jumlah ideal menurut Kepala Bagian Humas BNN, Kombes Sulistiandriatmoko adalah 74.000 personel (Belarminus, 2017). Dengan berbagai keterbatasan BNN diatas, maka sinergi dan kerjasama dengan berbagai institusi dan Kementerian terkait dalam penanganan narkotika ini sangat dibutuhkan. Terlebih lagi mengenai peredaran narkotika di wilayah laut, BNN tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan penindakan sendiri.

Pihak **Kedua** adalah pihak-pihak yang bertugas dalam hal keamanan, baik itu keamanan di laut, keamanan nasional secara umum dan juga keamanan wilayah perbatasan. Yang termasuk kedalamnya adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Polri, TNI-AL, Bakamla dan Bea Cukai. **Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman** adalah Kementerian yang baru dibentuk oleh pemerintahan Presiden Jokowi, dikarenakan fokus kebijakan pemerintahan yang berorientasi pada bidang kemaritiman. Kementerian ini bisa dikatakan sebagai Kementerian utama yang berperan penting, agar tercapainya doktrin poros maritim dunia. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Kemaritiman. Empat bidang yang di koordinasikan adalah terkait kedaulatan maritim, sumber daya alam dan jasa, Infrastruktur, serta SDM, IPTEK dan Budaya Maritim.

Mengenai kewanaman maritim juga merupakan salah satu cakupan tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, tepatnya ada di bawah koordinasi bidang kedaulatan maritim. Hal ini juga termasuk untuk mengatasi ancaman di bidang peredaran narkotika dengan memanfaatkan jalur laut. Namun, dalam perkembangannya fokus terhadap ancaman perdagangan narkotika melalui jalur laut ini sedikit terabaikan. Ancaman keamanan maritim, kejahatan yang seringkali mendapatkan perhatian lebih hanyalah kejahatan yang berkaitan dengan ancaman sumber daya alam seperti kegiatan *illegal fishing*. Padahal, disamping hal tersebut juga ada ancaman besar lainnya dimana wilayah laut Indonesia dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika.

Menurut Irjen Arman Depari, bahwa belum ada aksi nyata dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam mengatasi ancaman keamanan maritim terkait

peredaran narkoba. Luasnya wilayah garis pantai yang dimiliki oleh Indonesia, belum bisa diimbangi oleh Kementerian. Selain itu, juga belum ada kontribusi dalam memaksimalkan penanganan narkoba. Dikutip dari pernyataan Arman Depari (Warsito, 2018), menyampaikan, *“Jangan selalu muluk-muluk mengatakan bahwa penangkapan ikan kita berkurang dan sebagainya, baru dilakukan penindakan oleh pihak Menteri Kemaritiman. Seharusnya mereka tahu bahwa Indonesia ini rawan akan peredaran narkoba melalui jalur laut. Oleh sebab itu, saya minta Kementerian Kemaritiman harus benar-benar melakukan pengawasan di jalur laut karena itu memang ranah mereka”*.

Berikutnya, ada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang juga merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam hal keamanan dan penegakan hukum, termasuk di wilayah laut. Dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, sudah disebutkan adanya kerjasama yang harus dilakukan BNN dan Polri dalam penanganan masalah narkoba di Indonesia. Untuk melakukan pengamanan di wilayah perairan, Polri memiliki Direktorat Kepolisian Air (Dit Polair). Dalam tujuan menciptakan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, kemampuan Polair juga harus ditingkatkan. Salah satunya dalam menghadapi ancaman keamanan seperti peredaran narkoba melalui jalur laut. Perlunya Polri memperkuat Direktorat Kepolisian Perairan ini disampaikan secara langsung oleh Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) Andrea Pulungan. Beliau menyampaikan, *“Saya imbau perkuat polisi perairan. Kita negara poros maritim dengan sekian banyak pelabuhan tradisional, itu harus benar-benar diawasi.”* Andrea menyarankan agar sisi sumber daya manusia diperkuat, misalnya dengan menambah jumlah personel dan meningkatkan kemampuan personel, termasuk dalam bidang penyidikan. Kemudian, menambah armada laut dan melengkapi persenjataan polisi perairan (Gabrillin, 2018).

Peningkatan kemampuan Polair ini sudah diperlihatkan dari penambahan alutsista yang dimiliki. Pada tahun 2018 dilakukan penambahan armada sebanyak 23 kapal, dengan rincian satu unit kapal patroli lepas pantai dengan panjang 73 meter, lima unit kapal patroli 48 meter, dua unit kapal patroli 45 meter, dan 15 unit kapal pemburu cepat 15 meter (Safitri, 2018). Penambahan alutsista ini bisa meningkatkan kemampuan Polri dalam melakukan pengamanan wilayah maritim, termasuk untuk melakukan penanganan narkoba jalur laut. Dalam berbagai kasus terkait penanganan narkoba melalui jalur laut, Polri sudah sering terlibat dalam pasukan gabungan bersama pihak terkait lainnya seperti Bea cukai dan BNN. Salah satu keterlibatan Polri adalah dalam penangkapan penyelundupan sabu seberat 1.6 ton dari KM 61870 Penuin Union berbendera asing di Perairan Anambas, Kepulauan Riau, Batam. Kasus ini berhasil ditangani oleh aparat tim gabungan dari Satgassus Polri, Direktorat IV Tindak pidana narkoba, Bea Cukai Pusat, dan Bea Cukai Batam pada 20 Februari 2018.

Terkait dengan tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, **TNI-AL** juga ikut berperan dalam meningkatkan keamanan laut untuk mengatasi berbagai ancaman kelautan. Salah satunya terkait ancaman perdagangan narkoba melalui jalur laut. Untuk mengatasi permasalahan ini, TNI sudah memiliki Nota Kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan BNN di tahun 2015. Nota Kesepahaman tersebut mencakup bantuan dari TNI terhadap BNN dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, serta pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan dan pecandu narkoba dan prekursor narkoba. Keterlibatan TNI-AL dalam penanganan permasalahan narkoba melalui jalur laut ini juga disampaikan oleh Presiden Jokowi. Dalam kegiatan pengarahan yang diberikan kepada para petinggi TNI di Kalimantan Tengah pada 8 Desember 2014, Presiden menekankan agar TNI dapat membantu pemerintah dalam menjaga keamanan wilayah maritim, baik itu dari pencurian ikan maupun penyelundupan narkoba (BNN, 2014).

Berikutnya ada **Bakamla**, sebagai badan utama yang banyak paling mengalami penguatan pada era pemerintahan Jokowi dalam hal keamanan laut, baik itu dari segi

kelembagaan maupun hukum. Bakamla merupakan program pemerintah untuk memperkuat pertahanan dan keamanan laut sebagai Poros Maritim Dunia. Presiden memiliki tujuan untuk menjadikan Bakamla sebagai *coast guard* Indonesia. Karena, untuk menjadi poros maritim dunia dibutuhkan keamanan dan keselamatan laut yang kondusif dengan kekuatan penegakan hukum yang efisien dan efektif. Terkait dengan penanganan peredaran narkotika melalui jalur laut, Bakamla dan BNN menggelar latihan bersama dan bimbingan teknis dengan tujuan untuk mengantisipasi peredaran narkotika di perairan Indonesia. Kemudian juga dilakukan pembekalan mendeteksi narkoba oleh BNN kepada awak kapal patroli Bakamla Wilayah Kamla Zona Maritim Barat yang berjumlah 30 orang (TNI, 2018).

Untuk perjanjian kerjasama resmi antara Bakamla dan BNN, baru di laksanakan pada 9 Januari 2019. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara BNN dengan Bakamla, di Mako Bakamla, Jakarta. Isi nota kesepahaman tersebut adalah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia. (tni, 2019) Kemudian, pada 9 April 2019 bakamla dan BNN melakukan kerjasama dalam pembentukan desa maritim bersih narkoba (bersinar). Pembentukan desa maritim bersinar tersebut dikarenakan rawannya jalur laut dimanfaatkan untuk penyelundupan narkotika dan juga untuk mengatasi agar masyarakat pesisir tidak turut berpartisipasi dalam melakukan kejahatan tersebut. Desa pertama yang akan diterapkan sebagai desa maritim bersinar ini adalah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dalam implementasi pembentukan desa ini, bakamla akan mensosialisasikan mengenai keamanan dan keselamatan laut serta partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam rangka pemahaman pencegahan gangguan keamanan laut di wilayah mereka. Sedangkan BNN akan mengisi kegiatan seperti penyuluhan P4GN, tes urine, kegiatan anti narkoba dan pemberdayaan masyarakat dalam mencegah penyelundupan narkoba melalui jalur laut. (bakamla, 2019)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan lembaga yang ikut terlibat dalam menciptakan keamanan maritim Indonesia untuk mewujudkan poros maritim dunia. Seperti disampaikan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Tjertja Karja Adil dalam *Focus Group Discussion (FGD)* tentang “Pengembangan Kekuatan Pertahanan Negara dalam Konteks Poros Maritim Dunia Guna Kepentingan Nasional,” beliau menyampaikan bahwa konsep poros maritim dunia sejalan dengan Visi DJBC untuk menjadi instansi kepabeanan terkemuka di dunia. Untuk itulah, DJBC membutuhkan dukungan baik komunikasi dan koordinasi lintas sektoral dari seluruh stakeholders di pelabuhan (Amanda, 2019).

Dalam penanganan peredaran narkotika yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut, DJBC memiliki peranan yang besar. Hal ini dikarenakan kemampuan yang dimiliki DJBC cukup memadai dibandingkan pihak terkait lainnya, baik dalam hal sarana maupun prasarana untuk melakukan pengamanan wilayah laut. DJBC memiliki enam jenis kapal patroli, yaitu Kapal Fast Patrol Boat (FPB) ukuran 60 meter sebanyak dua kapal, FPB ukuran 38 meter sebanyak tujuh kapal, FPB ukuran 28 meter Aluminium 14 kapal, FPB ukuran 28 kayu sebanyak 20 kapal, Verry Slinder Vessel (VSV) ukuran 15 meter sebanyak 10 kapal, dan Speed Boat ukuran 15 dan 10 meter sebanyak 140 kapal (WartaBeaCukai, 2017). Besarnya peranan DJBC ini terlihat dari kasus-kasus penangkapan penyelundupan narkotika melalui jalur laut, dimana biasanya dalam penangkapan tersebut selalu melibatkan DJBC dalam proses penanganannya.

Salah satu contohnya adalah penangkapan kapal Sunrise Glory di selat Philips, perbatasan antara Singapura dan Batam pada 7 Februari 2018. Penangkapan ini berhasil menyita sabu seberat 1 ton dengan nilai mencapai Rp 1,5 triliun. Penangkapan ini berhasil dilakukan melalui patroli dan kerjasama antara BNN Pusat, Bea Cukai Pusat dan juga Bea Cukai Batam. Namun, untuk proses penanganannya melibatkan lebih banyak pihak. Sebelumnya, Direktorat IV Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri telah mengintai kapal

tersebut. Disampaikan oleh Brigjen Eko Daniyanto bahwa kapal tersebut telah di-TO (menjadi target operasi) sejak enam bulan sebelumnya. Kemudian, tim gabungan dari BNN, TNI Angkatan Laut dan Bea-Cukai telah melakukan operasi tersebut sejak 2 Desember 2017. Terkait adanya informasi mengenai kapal asing yang membawa narkotika ke Indonesia via laut dengan kapal ikan.

Pihak *ketiga* adalah yang berkaitan dengan kebutuhan informasi. Lembaga formal yang terlibat dalam pencarian dan pengumpulan informasi ini adalah Badan Intelijen Negara (BIN). Informasi biasanya menyangkut jaringan pengedar internasional yang mungkin menarget Indonesia sebagai pasar peredaran narkotikanya, dengan memanfaatkan jalur laut sebagai jalur keluar masuk perdagangan narkotika. BIN biasanya dilibatkan dalam momen-momen tertentu yang memungkinkan terjadinya penyelundupan secara besar-besaran, contohnya menjelang tahun baru. Seperti kerjasama antara BIN dan BNN menjelang tahun baru 2017 untuk mengatasi penyelundupan narkotika jalur laut.

Disamping lembaga formal, sumber informasi lainnya adalah melalui masyarakat. Peran aktif masyarakat pesisir untuk ikut memberikan informasi terkait adanya aktivitas perdagangan narkotika melalui jalur laut ini, sudah diupayakan melalui penyuluhan yang dilakukan oleh aparat-aparat kepada masyarakat pesisir. Contohnya saja penanganan tiga kasus penyelundupan narkotika di Aceh dan Medan pada Januari 2018. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat dan penyelidikan intelijen, bahwa akan ada penyelundupan narkotika yang dilakukan sindikat narkotika jaringan internasional Aceh - Padang, dari Malaysia ke wilayah perairan Aceh dengan menggunakan perahu motor. Dari informasi tersebut, petugas gabungan akhirnya berhasil mengamankan 110,84 kg methamphetamine (sabu) dan 18.300 butir ekstasi (Beacukai, 2018).

Upaya Pemberantasan Perdagangan Narkotika Jalur Laut Melalui Kerjasama dengan Negara Lain

Terkait dengan upaya penanganan narkotika jalur laut melalui kerjasama dengan negara lain, penelitian ini membahas mengenai kerjasama dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia, Australia dan Fiji. Kerjasama dengan Malaysia lebih bersifat melanjutkan kerjasama yang sudah ada sebelumnya. Kerjasama yang dilakukan dalam penanganan narkotika jalur laut ini ada dua jenis, yaitu kerjasama antar pihak kepolisian dan antara bea cukai kedua negara. Kerjasama antar kepolisian dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM). Kedua pihak sepakat melakukan kerjasama penanganan kejahatan transnasional hingga pengawasannya di wilayah perbatasan. Kapolri Jendral Timur Pradopo mengatakan kerjasama kepolisian Indonesia dan Malaysia ini terkait dengan bagaimana mengurangi kejahatan terutama kejahatan transnasional dan narkotika yang menjadi perhatian penuh baik oleh pihak Indonesia maupun Malaysia. Memperkuat kerjasama ini, juga dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan (MoU) GBC Malindo (*General Border Committee Malaysia-Indonesia*) Protap ke – 15 oleh Kapolri Jendral (Pol) Timur Pradopo dengan Ketua Polis Negara Tan Sri Ismail Omar di Kuala Lumpur pada 3 Desember 2010. Dimana salah satu isi kerjasamanya adalah terkait patroli pengawasan di perairan perbatasan. (Burhani, 2010)

Bentuk kerjasama lain yang dilakukan antara Indonesia dan Malaysia dalam penanganan kejahatan lintas batas melalui jalur laut, adalah dengan melibatkan bea cukai masing-masing negara. Dari Indonesia melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sedangkan Malaysia melibatkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM). Kerjasama ini bertujuan mengatasi masalah penyelundupan yang salah satu jenisnya adalah narkotika. Kerjasama yang dilakukan berbentuk patroli dalam menjaga wilayah laut. Kerjasama ini dinamakan Operasi Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Operasi Patkor Kastima).

Berikutnya adalah kerjasama dengan Australia. Pada 6 November 2018 juga dilakukan kerjasama antara BNN dan Persemakmuran Australia yang diwakili oleh Departemen Dalam Negeri melalui *Australian Border Force (ABF)*. Kedua negara sepakat melakukan kerjasama perlindungan perbatasan dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba. Kerjasama ini juga diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman pada hari Selasa, 6 November 2018. Penandatanganan tersebut diwakili oleh Heru Winarko selaku Kepala BNN dan Michael Outram APM selaku Komisioner *Australian Border Force*. Poin yang disepakati diantaranya adalah pertukaran berbagai informasi dalam memerangi kejahatan narkoba dan prekursor di perbatasan, pengembangan sumber daya manusia dalam operasi pemberantasan yang salah satunya yaitu unit canine, serta bidang-bidang lain yang menjadi perhatian bersama yang telah ditentukan terkait dengan pengawasan narkoba dan prekursor di wilayah perbatasan. (BNN, 2018)

Unit canine merupakan bagian kepolisian yang memiliki anjing yang dilatih untuk tujuan tertentu, salah satunya adalah untuk tujuan pemberantasan narkoba. BNN sendiri memiliki pasukan anjing yang dinamakan Pasukan K9. Pasukan K9 ini juga berperan dalam menangani penyelundupan narkoba yang dilakukan melalui jalur laut. Biasanya anjing pelacak ini dibawa untuk memeriksa kapal yang diduga membawa narkoba. Seperti dalam penangkapan tiga ton sabu dari Kapal Win Long BH 2998 di Selat Philips oleh DJBC Kepulauan Riau. Setelah kapal dicegat dan ditangkap, kemudian digiring ke Tanjungbalai, Karimun, bersama dengan 28 awak kapalnya untuk menjalani pemeriksaan. Disinilah kemudian pasukan anjing pelacak digunakan untuk memeriksa muatan kapal (SindoNews, 2018).

Negara berikutnya yang melakukan kerjasama penanganan narkoba yang mayoritas dilakukan melalui jalur laut dengan Indonesia adalah Fiji. Kerjasama penanganan narkoba lintas batas dengan Fiji awalnya dilakukan di tahun 2015. Poin kerjasama mengenai pertukaran informasi di kedua negara, terkait dengan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan kesepakatan kerjasama dalam peningkatan kapasitas, pelatihan serta kunjungan ahli dari kedua belah pihak. Pertukaran informasi dilakukan dalam beberapa aspek, seperti pertukaran informasi jaringan, rute, modus operandi, metode pencarian, penyitaan narkoba, metode pencucian uang serta bentuk-bentuk baru dari narkoba dan prekursor narkoba (Ilham, 2015).

Namun, kerjasama yang dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil yang cukup baik. Hal ini terlihat dari fakta yang terjadi di tahun berikutnya, dimana semakin banyaknya ditemukan kasus penyelundupan narkoba yang dilakukan melalui jalur laut. Akhirnya dilakukan peningkatan kerjasama dengan aspek yang lebih luas dari sebelumnya. Kerjasama dilakukan melalui sinergitas dibidang pemberantasan dan pengembangan *capacity building*. Beberapa diantaranya adalah pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi intelejen, pengembangan teknologi laboratorium, pertukaran informasi *trend* kejahatan narkoba, *cyber crime*, *human trafficking* dan sebagainya. Melalui kerjasama ini, Fiji dan Indonesia sepakat untuk saling mendukung berbagai upaya yang berkaitan dengan kejahatan narkoba yang terjadi di kedua negara tersebut (BNN, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa penanganan terhadap ancaman keamanan maritim di Indonesia setelah adanya doktrin poros maritim ini memperlihatkan dampak yang positif. Dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, fokus bidang kemaritiman lebih besar pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini terlihat dari kebijakan dan juga pembentukan institusi khusus yang berkaitan dengan kemaritiman, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Bakamla. Berdasarkan data mengenai penanganan peredaran narkoba melalui jalur laut, upaya domestik dan kerjasama dengan negara lain yang dilakukan Indonesia memberikan dampak yang positif. Jumlah narkoba yang berhasil diamankan mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Dalam upaya domestik yang dilakukan untuk menangani permasalahan narkotika jalur laut ini, institusi yang ada di Indonesia saling bersinergi. Meskipun dalam penanganan kasus narkotika BNN merupakan *focal point*, namun untuk penanganan narkotika lintas batas melalui jalur laut kemampuan yang dimiliki institusi ini sangat terbatas. Dalam penanganan kasus narkotika melalui jalur laut ini, pihak yang memiliki peranan lebih dominan adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC). Hal ini dikarenakan DJBC memang berfokus pada pengamanan lalu lintas barang di wilayah perbatasan, serta kemampuan yang dimiliki terkait sarana dan prasarana juga jauh lebih memadai dibandingkan dengan BNN. Untuk institusi khusus kemaritiman yang baru didirikan era pemerintahan Jokowi yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, sayangnya belum memberikan peranan dalam penanganan permasalahan ini. Sedangkan untuk Bakamla cukup banyak melakukan kegiatan bersama BNN, seperti kegiatan pelatihan penanganan kasus narkotika melalui jalur laut ataupun dalam kegiatan terbaru pembentukan desa Maritim Bersinar di daerah pesisir perbatasan.

Untuk upaya yang dilakukan melalui kerjasama dengan negara lain, Indonesia melakukan kerjasama dengan beberapa negara tetangga. Penelitian ini membahas mengenai tiga negara diantaranya yaitu Malaysia, Australia dan Fiji. Kerjasama dengan Malaysia lebih fokus pada kegiatan patroli, terutama di wilayah Selat Malaka, sedangkan dengan Australia dan Fiji lebih banyak bekerjasama dalam hal berbagi informasi dan *capacity building*. Kerjasama yang dilakukan dengan negara lain ini memberikan dampak yang positif bagi Indonesia, baik dalam kaitannya dengan penanganan kasus maupun peningkatan kemampuan.

Namun disamping pengaruh positif yang diperlihatkan tersebut, kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini masih terbatas dan belum mencapai hasil maksimal. Untuk berbagai institusi domestik terkait yang dimiliki Indonesia, masih banyak yang terkendala baik dalam hal sarana maupun prasarana. Begitupun untuk sinergi yang dijalankan antar institusi tersebut, ada beberapa pihak yang masih belum memberikan kontribusi yang sesuai, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Sedangkan untuk kerjasama dengan negara lain juga belum mencapai hasil maksimal, dikarenakan fokus kerjasama yang memang cenderung bersifat terbatas ataupun dikarenakan kerjasama tersebut baru dilaksanakan dan belum berlangsung dalam waktu yang lama.

REFERENSI

- Amanda, G., 2019. *Bea Cukai Dukung Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia*. [Online] <https://republika.co.id/berita/beacukai/berita-beacukai/pq1yp5423/bea-cukai-dukung-indonesia-jadi-poros-maritim-dunia>
- Bakamla, 2019. *Bakamla dan BNN Segera Bentuk Desa Maritim Bersinar*. [Online] https://bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/4001/5b46d89715605ff290ebd03988012c97
- Belarminus, R., 2017. *Anggaran Terbatas, BNN Mengaku Sudah Berdarah-darah Cegah Narkoba*. [Online] <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/14/17414001/anggaran-terbatas-bnn-mengaku-sudah-berdarah-darah-cegah-narkoba>
- BNN, 2014. *Jokowi Minta TNI Bantu Cegah Pencurian Ikan dan Peredaran Narkoba*. [Online] <https://bnn.go.id/jokowi-minta-tni-bantu-cegah-pencurian-ikan-dan-peredaran-narkoba/>
- Burhani, R., 2010. *Polri-PDRM Kerja Sama Menindak Kejahatan Transnasional*. [Online] <https://www.antaraneews.com/berita/236218/polri-pdrm-kerja-sama-menindak-kejahatan-transnasional>
- Gabrillin, A., 2018. *Antisipasi Peredaran Narkoba, Kopolnas Minta Polisi Perairan Diperkuat*. [Online]

- <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/24/13594401/antisipasi-peredaran-narkoba-kompolnas-minta-polisi-perairan-diperkuat>
- Germond, B., 2015. The geopolitical dimension of maritime security. *Marine Policy*, Volume 54, pp. 137-142.
- Ilham, 2015. *Tanggulangi Narkoba, BNN Gandeng Kepolisian Republik Fiji*. [Online] <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/09/03/nu417d361-tanggulangi-narkoba-bnn-gandeng-kepolisian-republik-fiji>
- kemenlu.go.id, 2014. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. [Online] <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx> diakses pada 17 September 2018.
- kkp.go.id, n.d. *Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia*. [Online] <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa> diakses pada 17 September 2018.
- Morris, L., 2018. *Assessing Recent Developments In Indonesian Maritime Security*. [Online] <https://amti.csis.org/assessing-recent-developments-in-indonesian-maritime-security/#jp-carousel-24688>
- Pitoko, R. A., 2018. *Perangi Narkoba di Jalur Laut, BNN Butuh Kerjasama KKP dan TNI AL*. [Online] <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/26/16175351/perangi-narkoba-di-jalur-laut-bnn-butuh-kerjasama-kkp-dan-tni-al>
- Safitri, E., 2018. *Kapolri Resmikan 25 Armada Baru Korps Polairud Baharkam Polri*. [Online] <https://news.detik.com/berita/d-4327944/kapolri-resmikan-25-armada-baru-korps-polairud-baharkam-polri>
- Setkab, 2016. *Presiden Jokowi Ingin Kembangkan Pelabuhan Kelas Dunia di Perbatasan Selat Malaka, Natuna, dan Batam*. [Online] <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-ingin-kembangkan-pelabuhan-kelas-dunia-di-perbatasan-selat-malaka-natuna-dan-batam/>
- SindoNews, 2018. *Angkut Sabu 3 Ton, Kapal Myanmar Ditangkap*. [Online] <https://daerah.sindonews.com/read/1284793/194/angkut-sabu-3-ton-kapal-myanmar-ditangkap-1519455107>
- TNI, 2019. *Kepala Bakamla Teken MoU dengan Tiga Lembaga*. [Online] <https://tni.mil.id/view-144017-kepala-bakamla-teken-mou-dengan-tiga-lembaga.html>
- VOA, 2014. *BNN: Perairan Indonesia Rawan Penyelundupan Narkoba*. [Online] <https://www.voaindonesia.com/a/bnn-perairan-indonesia-rawan-penyelundupan-narkoba/1863557.html> diakses pada 28 September 2018.
- Warsito, B., 2018. *Kemenko Maritim Belum Komit Berantas Narkoba*. [Online] <https://www.jawapos.com/jpg-today/22/08/2018/kemenko-maritim-belum-komit-berantas-narkoba/>
- Warta Bea Cukai, 2017. *Patroli laut DJBC Memiliki Peran Penting Sebagai Penjaga Pintu Gerbang Bangsa*. Jakarta Timur: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.